

FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINA PENGANGGURAN (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH UTARA)

Nasruddin, Irfan dan Fauzan
Program Studi Ekonomi Pembangunan
STIE Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause the occurrence of unemployment in North Aceh . Data used in this research is quantitative secondary data are annual data in the form of numbers . Source of data obtained from the Central Statistics Agency report (BPS) North Aceh District from 2003 until 2013. From the results obtained regression coefficient $R = 0.032074$ which shows the relationship variable partial unemployment on the unemployment rate . The regression results obtained value of $R^2 = 0.225659$, which means that the variable labor force and population affect the unemployment rate (dependent variable) in North Aceh . Partially t -test of the labor force amounted to 1.069654 . T -test value (1.069654) < t - table (2.22814) , meaning H_1 H_0 is rejected and accepted , which means the labor force do not have a significant effect on the unemployment rate in northern Aceh . t - count population of 1.468538 . T -test value (1.468538) < t - table (2.22814) , meaning H_2 H_0 is rejected and accepted , which means the number of people do not have a significant effect on the unemployment rate in northern Aceh .

Keywords : *Unemployment , Keja Force and Population*

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara – negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran

tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2007).

Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat diikuti pula dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat

akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, menimbulkan kesulitan kepada Negara-Negara berkembang untuk mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penduduk yang semakin cepat dan dalam jumlah yang besar sekali dapat menimbulkan beberapa masalah baru dan salah satu masalah tersebut adalah masalah pengangguran. Sedangkan pertambahan penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya menyebabkan masalah pengangguran menjadi bertambah buruk (Sadono Sukirno, 1985). Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja ternyata tidak diimbangi oleh tingginya penyerapan tenaga kerja yang ada. Akibat dari kurangnya penyerapan tenaga kerja yang tersedia akan menimbulkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi.

Masalah pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pemerintah yang diprioritaskan dalam menyusun strategi pembangunan. Strategi ini merupakan salah satu strategi dari *triple track strategy* pemerintah, yang meliputi penanggulangan masalah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari kerja atau sedang menyiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau sudah diterima kerja tetapi belum mulai bekerja. Definisi ini telah digunakan pada pelaksanaan Survei Angkatan

Kerja Nasional (Sakernas) sejak tahun 2001.

Masalah kependudukan yang serius dihadapi oleh Provinsi Aceh pada umumnya, antara lain aceh utara pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, dan lapangan pekerjaan. Kekurang tersediaan lapangan pekerjaan akan berimbas pada keamanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada.

Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Atau setidaknya, setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai "gengsi" yang lebih tinggi di banding sektor informal. Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan akan berpotensi tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja, secara linear berpotensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan dalam perspektif masyarakat.

Masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Maka merembaknya isu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencanaan pendidikan di kota-kota Besar pada umumnya, khususnya juga di aceh utara. Kemudian latar belakang

penulis membuat Skripsi ini adalah untuk mengetahui masalah pengangguran di aceh utara.

Pengangguran menurut SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 1985 didefinisikan sebagai mereka yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya asalkan dalam kurun waktu satu minggu sebelum pencacahan masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Ada tiga faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Aceh utara. Ketiga faktor tersebut adalah :Ketidak sesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, Ketidak seimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dihasilkan masih rendah, Lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja umumnya tidak sesuai dengan tingkat pendidikan atau ketrampilan yang dimiliki.

Umumnya perusahaan atau penyedia lapangan kerja membutuhkan tenaga yang siap pakai, artinya sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya, namun dalam kenyataan tidak banyak tenaga kerja yang siap pakai tersebut. Justru yang banyak adalah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan job yang disediakan. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tahun 2007 pemerintah juga sangat agresif menggulirkan program pengurangan pengangguran dan kemiskinan, di antaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program yang menelan anggaran Rp 51 triliun itu menjangkau sekitar 33 provinsi, 2.891 kecamatan, dan 33.527 desa/kelurahan atau 31,92 juta orang miskin di Indonesia yang salah satunya aceh utara. PNPM yang bertumpu pada proyek-proyek padat karya, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan desa mandiri energi, pembukaan lahan kelapa sawit, tebu, dan jarak sebagai sumber energi alternatif, diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 12,5 juta orang sampai 14,4 juta orang per tahun.

Program pengurangan pengangguran yang digulirkan pemerintah jelas bukan bersifat instant, melainkan memiliki sasaran jangka panjang, dari hulu hingga hilir. Itu sebabnya, selain melaksanakan program nyata di lapangan, pemerintah juga merancang sistem pendidikan berorientasi kerja. Dalam kaitan ini, Depnakertrans dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menyepakati perubahan sistem pendidikan nasional dari semula bersifat *output oriented* menjadi *job oriented*. Jika sebelumnya perbandingan sekolah umum dengan kejuruan sangat jauh (sekitar 70:30), kelak proporsinya diubah menjadi 60:40 atau 30:70. Sasarannya tiada lain agar lulusan sekolah menengah bisa langsung bekerja atau siap membuka lapangan kerja.

Besarnya komposisi lembaga pendidikan kejuruan akan menciptakan *link and match* dunia pendidikan dan lulusannya dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha. Komposisi seperti ini telah banyak diterapkan kota-kota lain di Bireuen maupun di kota lhokseumawe, dan terbukti mampu menekan laju pengangguran. Pemerintah terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi secara sektoral sebab penciptaan lapangan kerja berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan sektor tersebut. Sektor yang tumbuh lebih cepat, seperti sektor perdagangan atau industri, menciptakan lapangan kerja lebih besar. Penurunan tingkat pengangguran membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kemampuan ekonomi yang makin luas dalam menciptakan lapangan kerja. Ini menuntut kebijakan dengan fokus yang tajam, institusi yang kuat, kerja yang keras, serta kesadaran dan kesabaran yang memadai agar masalah pengangguran tertangani secara berkelanjutan.

Angka pengangguran tidak saja ditentukan oleh lapangan kerja baru yang tercipta, tetapi juga oleh tambahan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja yang besarnya cukup fluktuatif. Lebih lanjut daerah-daerah yang merupakan kantong pengangguran perlu didorong untuk menciptakan lapangan kerja, baik melalui kebijakan investasi daerah maupun APBD. Pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan selanjutnya juga diimbangi oleh pemerataan pembangunan dengan mendorong pembangunan di luar aceh utara lebih cepat. Yang tidak kalah penting adalah dukungan institusi yang kuat dalam menjabarkan.

Termasuk di dalamnya adalah mekanisme yang mampu memastikan bahwa pelaksanaan dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dimaksud benar-benar terjabarkan dengan baik, termasuk oleh desa. Terakhir, yang juga menentukan adalah kesadaran yang tinggi bahwa masalah pengangguran merupakan tantangan besar yang harus ditangani bersama. Sebab, kunci keberhasilan penanganan pengangguran dan kemiskinan sejatinya ada pada sinergi semua pihak, yakni pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu solusi pengangguran dapat dilakukan dengan mengembangkan suatu lembaga antar kerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai *job center*, dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (*brainware*), perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manajemen dan keuangan.

Proses untuk mengukur maju atau mundur dari suatu perekonomian dan pembangunan suatu daerah, dapat dilihat atau diukur dari jumlah pengangguran yang ada di daerah tersebut, karena pengangguran mengindikasikan parameter sejahtera atau tidaknya penduduk suatu daerah. Di Aceh Utara, pengangguran merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan mengingat angka atau besaran tingkat pengangguran di aceh utara yang mengalami kenaikan tiap tahunnya diikuti bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja aceh utara. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat

mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan, Oleh karena itu kesejahteraan penduduk meningkat. Dibawah ini adalah data yang didapatkan dari BPS Aceh Utara

Tabel 1.1. Persentase Pengangguran, Angkatan kerja dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Aceh Utara 2003-2013

No	Kabupaten	Tahun	Persentase Pengangguran	Persentase Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk
1	Aceh Utara	2003	17	49 2	492.437 0
2	Aceh Utara	2004	52	56 3	485.446 0
3	Aceh Utara	2005	91	52 0	504.163 0
4	Aceh Utara	2006	71	47 2	505.940 0
5	Aceh Utara	2007	37	40 5	510.494 0
6	Aceh Utara	2008	31	32 16	517.741 0
7	Aceh Utara	2009	36	37 12	532.537 0
8	Aceh Utara	2010	78	40 12	529.751 0
9	Aceh Utara	2011	57	42 12	544.690 0
10	Aceh Utara	2012	536.189 0	48 2	96
11	Aceh Utara	2013	549.370 0	46.3	36

Sumber: BPS Aceh Utara (Data Di Olah)

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, besarnya jumlah pengangguran yang terus meningkat sejalan dengan tingginya tingkat angkatan kerja yang rata-rata peningkatan setiap tahun serta diiringi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi disamping naiknya harga BBM yang dialami oleh masyarakat aceh utara. Namun demikian tingginya pengangguran yang terjadi ternyata juga diikuti oleh peningkatan upah yang diterima serta berfluktuasinya inflasi di aceh utara. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus membesar. Peningkatan angkatan

kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran di aceh utara dari tahun ke tahun semakin tinggi angka pengangguran.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik, definisi penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia diatas 15 tahun. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia

kerja yang masih sekolah, ibu rumah tangga atau pensiunan. Angkatan kerja terbagi menjadi dua yakni bekerja dan menganggur atau mencari pekerjaan.

Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2007).

Menurut BPS, seseorang dikategorikan sebagai menganggur atau mencari pekerjaan apabila termasuk penduduk usia kerja yang (1) tidak bekerja, atau (2) sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja, atau (3) sedang mempersiapkan suatu usaha, atau (4) yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau (5) yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Lipsey, *et al* (1997), pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangguran siklis, pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Pengangguran siklis adalah penganggur yang terjadi karena permintaan yang tidak memadai untuk membeli semua potensi keluaran ekonomi, sehingga mengakibatkan senjang resesi dimana keluaran aktual lebih kecil dari keluaran potensial. Kelompok penganggur ini juga dikatakan sebagai orang yang menganggur dengan terpaksa, dengan kata lain mereka ingin bekerja dengan tingkat upah yang berlaku tetapi

pekerjaan yang mereka inginkan tidak tersedia.

Pengangguran struktural mengacu kepada pengangguran yang disebabkan akibat ketidaksesuaian antar struktur angkatan kerja berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri atau lokasi geografis dan struktur permintaan akan tenaga kerja. Menurut Mankiw (2000), pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penajatahan pekerjaan. Para pekerja yang tidak dipekerjakan bukan karena mereka aktif untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk mereka, namun pada tingkat upah berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Sedangkan pengangguran friksional diakibatkan oleh perputaran normal tenaga kerja. Sumber penting pengangguran friksional adalah orang-orang muda yang memasuki angkatan kerja dan mencari pekerjaan (Lipsey *et al.*1997).

Menurut Mankiw (2000), pengangguran friksional yaitu pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Para ekonom menyebut perubahan komposisi permintaan antar wilayah sebagai pergeseran sektoral. Perubahan dalam komposisi permintaan diantara industri atau wilayah selalu terjadi dan karena perlu waktu untuk mengubah sektor maka pengangguran friksional selalu muncul.

2. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2008:328) jenis-jenis pengangguran adalah sebagai berikut :

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh

tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.

2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Menurut Tambunan (2001:58), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Adapun jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dapat dibedakan atas:

a. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim

paceklik. Di mana banyak petani yang menganggur, karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya.

b. Pengangguran Friksional (Peralihan)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain, sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran.

c. Pengangguran karena Upah Terlalu Tinggi

Pengangguran karena upah terlalu tinggi artinya pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi, sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Akan tetapi di Indonesia saat ini sudah terdapat ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan biaya hidup daerah masing-masing, sehingga antara pekerja dengan pengusaha sudah terdapat consensus dalam penentuan upahnya.

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan.

e. Pengangguran Voluntary

Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena

seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup.

f. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.

g. Pengangguran Potensial

Pengangguran potensial (potential underemployment) adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi, misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin (mekanisasi).

3. Faktor Penyebab Pengangguran

Kekakuan upah merupakan penyebab terjadinya pengangguran (Mankiw, 2000). Kekakuan upah berarti gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel, sehingga upah riil tertahan di atas tingkat pasar atau tingkat ekuilibrium sehingga terjadi pengangguran.

Untuk memahami kekakuan upah dan pengangguran struktural, maka penting untuk memahami mengapa pasar tenaga kerja tidak berada pada tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan gambar.2.1. Saat upah riil melebihi tingkat

ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka para perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw, 2000).

Kekakuan upah ini terjadi sebagai akibat dari beberapa hal yaitu, indeksasi Undang-Undang upah minimum, kekuatan monopoli serikat pekerja dan upah efisiensi. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengangguran.

Kebijakan upah minimum akan memberi insentif kepada perusahaan untuk mengganti para pemuda dengan orang-orang dewasa yang tidak terdidik. Kebijakan upah minimum ditenggarai akan lebih banyak berdampak pada penganggur dengan usia muda (Mankiw, 2000). Alasannya yaitu, pertama, karena pekerja dengan usia lebih muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, maka mereka cenderung memiliki produktivitas marginal yang rendah. Kedua, seringkali mereka mengambil sebagian kompensasi mereka dengan mengikuti *on the job training* daripada bayaran secara langsung. Oleh karena itu, upah minimum seringkali berpengaruh pada pemuda ketimbang yang lainnya dalam angkatan kerja.

Upah para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja tidak ditentukan oleh ekuilibrium permintaan dan penawaran, tetapi oleh posisi

tawar-menawar kolektif antara pimpinan serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Biasanya, kesepakatan akhir meningkatkan upah diatas tingkat ekuilibrium dan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga akan mengakibatkan pengangguran (Mankiw, 2000). Penjelasan ini didukung oleh Mc Donald dan Solow (1981) yang menyatakan dengan terjadinya monopoli bilateral antara perusahaan dan serikat buruh, maka keseimbangan yang terjadi akan berhubungan dengan kesempatan kerja tetapi upah riil relatif stabil. Jika penentuan upah dilakukan melalui kontrak antar perusahaan dan serikat pekerja maka *marginal cost* dan harga akan menjadi kaku. Hal ini akan mengakibatkan fluktuasi permintaan yang akan ditransmisikan melalui *output* dan kesempatan kerja. Model ini juga bisa dianggap sebagai salah satu alasan terjadinya rigiditas upah riil.

Teori upah efisiensi merupakan penyebab ketiga dari kekakuan upah selain undang-undang upah minimum dan serikat pekerja. Menurut Mankiw (2000) teori upah efisiensi ini akan membuat upah semakin tinggi dan membuat para pekerja lebih produktif. Teori upah ini lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin yang menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja yang dibayar dengan upah memadai bisa lebih banyak membeli nutrisi dan para pekerja akan lebih produktif. Suatu perusahaan mungkin akan membayar tingkat upahnya di atas tingkat ekuilibrium untuk menjaga agar tenaga kerjanya tetap sehat.

Berbagai studi literatur membahas indeksasi yang kebanyakan menghubungkan dengan variabel

moneter seperti inflasi Holland (1988), Brunner. *et al.* (1988), Vanhoose dan Waller (1991) maupun kaitannya dengan stabilitas output (Esteban, 2002). Menurut Holland (1988), konsep indeksasi seperti yang diungkapkan dibawah ini :

" The wage indexation variable was the percentage of workers covered by major collective bargaining agreements who some provision for cost of living adjustment in their contracts " Steven Holland, (1988)

Pada intinya indeksasi adalah upah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup, dengan kata lain, upah ini telah disesuaikan dengan inflasi. Indeksasi akan mengakibatkan keterbatasan kebijakan moneter yang ekspansif untuk mengatasi pengangguran. Jika kebijakan moneter ekspansif terus dilakukan dalam kondisi pengangguran yang tinggi, maka akan mengakibatkan inflasi yang persisten.

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data tahunan dalam bentuk angka-angka. Sumber data diperoleh dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 (11 tahun) serta jurnal-jurnal dan hasil penelitian, sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan untuk keperluan penelitian ini.

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang terkait. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dan informasi

melalui telaah berbagai literatur yang relevan. Yang diperoleh dari publikasi resmi yang berhubungan dengan masalah yang ada di dalam menulis penelitian. Yang dapat diperoleh dari buku-buku, surat kabar, internet dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan pencatatan langsung yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah disebutkan diatas sesuai yang digunakan.

Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengangguran di Kabupaten Aceh Utara digunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan asumsi-asumsi yang digunakan adalah variabel independent dan variabel dependent mempunyai hubungan yang linear.

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka pengujian statistik dalam penelitian ini dengan menguji pengukuran secara persamaan regresi. Untuk menguji variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji f.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independent (X1) dan (X2) secara parsial terhadap pengangguran (Y) digunakan uji t dengan ketentuan jika hasil penelitian dan pengolahan data dijumpai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka penelitian ini harus menerima H_o dan menolak H_a .

Sedangkan pengujian F bahwa jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka menerima H_a dan menolak H_o , artinya bahwa jumlah penduduk, kemiskinan dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe.

D. Hasil Penelitian

1. Pengujian R

Koefisien korelasi adalah koefisien yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan antar dua peubah atau lebih. Koefisien korelasi adalah koefisien yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan antar dua peubah atau lebih. Dari hasil regresi di peroleh nilai koefisien $R = 0.032074$ yang menunjukkan keeratan hubungan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat pengangguran. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara parsial variabel bebas sebesar 0,3%, memiliki hubungan yang terhadap tingkat pengangguran di Aceh Utara, dan sisanya sebesar 99,7% dihubungkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2. Pengujian R^2

Koefisien determinasi adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dari hasil regresi di peroleh nilai $R^2 = 0.225659$ yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mampu mempengaruhi sebesar 22,5% terhadap tingkat pengangguran (variabel dependent) di Aceh Utara. Sisanya sebesar 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3. Uji t-statistik (Uji Parsial).

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual

dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Dari hasil regres t -statistik yaitu sebagai berikut:

$$\alpha = 5\%, n = 11, k = 1$$

$$Df = n - k = 11 - 1 = 10$$

$$t_{\text{tabel}} = 2.22814$$

Secara parsial t -hitung angkatan kerja sebesar 1.069654. Nilai t -hitung (1.069654) < t -tabel (2,22814), berarti H_{i1} ditolak dan H_{01} diterima yang artinya angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di aceh utara. t -hitung jumlah penduduk sebesar 1.468538. Nilai t -hitung (1.468538) < t -tabel (2,22814), berarti H_{i2} ditolak dan H_{02} diterima yang artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di aceh utara.

4. UJI F-statistik.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: Jika $F_{\text{hit}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. Dan jika $F_{\text{hit}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

Jika F hitung < F table, (1.165684 > 4,965) maka hipotesa yang menyatakan ada pengaruh positif yang signifikan antara jumlah penduduk

(X1), angkatan kerja (X2), terhadap pengangguran (Y) adalah diterima.

E. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kab. aceh Utara. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil regresi di peroleh nilai koefisien $R = 0.032074$ yang menunjukkan keeratan hubungan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat pengangguran. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara parsial variabel bebas sebesar 0,3%, memiliki hubungan yang terhadap tingkat pengangguran di Aceh Utara, dan sisanya sebesar 99,7% dihubungkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
2. Dari hasil regresi di peroleh nilai $R^2 = 0.225659$ yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mampu mempengaruhi sebesar 22,5% terhadap tingkat pengangguran (variabel dependent) di Aceh Utara. Sisanya sebesar 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
3. Secara parsial t -hitung angkatan kerja sebesar 1.069654. Nilai t -hitung (1.069654) < t -tabel (2,22814), berarti H_{i1} ditolak dan H_{01} diterima yang artinya angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di aceh utara. t -hitung jumlah penduduk sebesar 1.468538. Nilai t -hitung (1.468538) < t -tabel (2,22814), berarti H_{i2} ditolak

dan H_{02} diterima yang artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di aceh utara.

F. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. Laporan Badan Pusat Statistik. Berbagai Edisi. BPS, Jakarta.
- Burdett, K dan T. Vishwanath. 1988. "Declining Reservation Wage and Learning". *The Review of Economic Studies*, Vol.55 No.4, pp. 655-665.
- Elmeskov, J. 1993. "High and Persistent Unemployment : Assesment Of The Problem and Its Causes". *Resource Allocation Division Organisation For Economic Co-Operation and Development*. Paris.
- Fink, A. 2002. *The Survey Kit : How to Design Surveys*. Sage Publication, 2nd edition.
- InterCAFE. 2008. "Studi Empiris Persistensi Pengangguran di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Berdasarkan Analisis Data Mikro". Institut Pertanian Bogor, Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan, Bank Indonesia, Bogor.
- Lindbeck, A dan D. J. Snower. 1988 "Cooperation, Harassment and Involuntary Unemployment : An insider Outsider Approach". *American Economic Review*, pp. 167-88.
- Lipsey, R, *et al.* 1997. Pengantar Makroekonomi. Agus Maulana [penerjemah]. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Mankiw, G. 2000. Teori Makroekonomi. Imam Nurmawan. [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Mc Donald, I, dan Robert M Solow. "Wage Bargaining and Employment". *American Economic Review* 71, Desember 1981, pp. 896-908.
- Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Ilmiah. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prasad, E. S. 2003. "What Determines the Reservation Wages of Unemployed Workers ? ". New Evidence from German Micro Data.
- Steinier, V. 2001. "Unemployment Persistence in the West German Labour Market : Negative Duration Dependence or Sorting ?". *Oxford Bulletin Economic and Statistics*. Blackwell Publishers. Routledge Taylor dan Francis Group.
- Sugiono. *Metode Penelitian Admnistrasi*, Alfabeta Bandung. 2003
- Supranto, J, *Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, Rineke Cipta, Jakarta. 2001